

PELARIAN DARI IRIAN MASALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA

R.S. ROOSMAN

Garis lurus yang melintang dari utara ke selatan di peta Pulau Irian, dan memotongnya menjadi dua belah, ialah Irian Jaya dan Papua New Guinea, sebenarnya merupakan garis tak nyata. Pada hakikatnya garis perbatasan ini tertutup oleh hutan-rimba raya, dan hanya dapat dikenal orang oleh karena didirikan tugu-tugu beton pada jarak-jarak tertentu yang cukup jauh antaranya. Di kiri-kanan perbatasan ini terdapatlah kampung-kampung yang penduduknya sering berhubungan dan kunjung-mengunjungi, karena ada pertalian famili, ataupun mempunyai ladang. Seorang penduduk di sebelah kawasan Indonesia misalnya secara kebetulan memiliki ladangnya di daerah yang termasuk wilayah Papua New Guinea. Pelintasan perbatasan tradisional ini (traditional border crossing) — yang terjadi harian — telah berlaku sejak lama. Untuk penduduk kampung-kampung perbatasan ini konsep kawasan (territory) hanya diketahui dari kunjungan patroli-patroli perbatasan Indonesia ataupun Australia (sekarang Papua New Guinea).

Sebelum Perang Dunia II sewaktu Pulau Irian di bawah Belanda dan Australia tak pernah pelintasan perbatasan sampai meletus menjadi masalah internasional, karena kedua pemerintahan telah mendapatkan kata sepakat bahwa "pelintasan tradisional ini sudah selayaknya terjadi dan kepada penduduk perbatasan seharusnya diberi keleluasaan untuk berbuat demikian". Pelintasan semacam ini tidak menimbulkan suatu ancaman terhadap pihak manapun juga, maka kehidupan tradisional di perbatasan — yang kebanyakan terdiri dari saling berkunjung serta menggarap ladangnya masing-masing — dapat berlangsung terus tanpa diusik oleh siapa-siapa.

Dengan adanya bangsa Australia masih terang teringat akan invasi Bala Tentara Dai Nippon di New Guinea pada Perang Dunia II — yang membawakan Perang Pasifik sampai ke ambang pintu Australia — maka penyerbuan tentara Indonesia untuk merebut Irian dari tangan Belanda pada tahun 1963, menghidupkan kembali ketakutan di kalangan bangsa Australia, bahwa perang mungkin dapat meluas ke kawasan mereka yang terdekat dari Indonesia, ialah Papua New Guinea. Maka bala bantuan tentara Australia waktu itu dikirimkan ke daerah perbatasan.

Setelah pengoperan Irian, kekuatiran akan kemungkinan adanya invasi dari pihak Indonesia ke arah Timur dengan berlarut-larut berdemam terus, sekalipun orang yang mendalangi penyatuan Irian ke dalam wilayah Indonesia — ialah almarhum Presiden Soekarno — lama telah wafat. Setelah Papua New Guinea menjadi merdeka pada tanggal 16 September 1975, pikiran yang selanjutnya timbul di negara itu akan "Greater Melanesia" (Kesatuan Melanesia Raya) — yang terdiri dari bangsa Melanesia di daerah Pasifik Selatan, ialah Pulau Irian, Kepulauan Solomon, New Hebrides, New Caledonia, dan Fiji — yang sifat fisiknya berkulit hitam dan berambut keriting, bolehlah ditafsirkan sebagai suatu manifestasi dari phobia "untuk bertahan menghadapi kemungkinan serangan dari pihak Indonesia ke arah Timur".

Tumbangnyanya rezim Soekarno pada tahun 1966 disusul oleh pergantian politik di Indonesia yang sangat berbeda haluannya. Usaha Pemerintah Orde Baru untuk mengejar dan menangkap bekas anasir-anasir kiri di dalam ABRI — yang mencoba meloloskan diri ke luar negeri, akhirnya hanya terbatas pada operasi-operasi sepanjang perbatasan Malaysia — terutama di Kalimantan Utara — dan Papua New Guinea.

Dengan Pemerintah Malaysia lekaslah didapati kata sepakat mengenai formulasi istilah "refugee" (pelarian) — yang dalam hal ini diartikan "pemberontak". Maka tak ada kesulitan untuk mengajak Malaysia melakukan operasi bersama menyapu bersih daerah perbatasan bersama dari kaum kiri. Namun dengan Papua New Guinea, ternyata halnya berlainan.

Seth Rumkorem — seorang putera daerah Biak di Irian Jaya, dan bekas perwira ABRI — setelah melakukan desersi bersama beberapa

rekannya mulai berperang mini gerilya secara sergap dan lari (hit and run battles) sepanjang perbatasan Papua New Guinea — Indonesia. Sesungguhnya mereka main kucing dan tikus dalam siasatnya, dan mempergunakan daerah perbatasan Papua New Guinea semata-mata untuk mencari suaka bilamana dikejar oleh ABRI. Pernah gerombolannya berjumlah kira-kira 400 orang. Mustahillah mereka dapat bertahan jikalau tak dibantu oleh penduduk setempat yang merasa kurang senang dengan keadaan dan perkembangan di Irian. Dalam logistik ketentaraan Rumkorem cs tidak setanding dengan 25-30 ribu orang ABRI yang ditempatkan pada pos-pos strategis. Konon kabarnya, kini hanya tinggal 11-14 orang pengikutnya yang masih taat kepadanya.

Gerakan Rumkorem ini biasanya disebut-sebut orang OPM (Organisasi Papua Merdeka). Di Australia serta Papua New Guinea singkatan tersebut telah dipopulerkan pula, dan mengandung maksud separatis akan mendirikan negara West Papua sendiri. Bantuan uang datang pula dari luar negeri, antara lain dari golongan-golongan atau organisasi-organisasi tertentu di Papua New Guinea, Australia, Negeri Belanda dan Jepang; demikian pula dari beberapa negara di Afrika, namun sebagian besar sokongan mereka ini hanya berupa publicity untuk OPM saja.

Adapun Irian Jaya telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Republik Indonesia pada tahun 1969 dengan diawasi dan disetujui oleh PBB, ini berarti bahwa cita-cita "Indonesia Raya dari Sabang sampai ke Merauke" yang telah begitu lama diidam-idamkan akhirnya terwujudlah! Maka dapat pula dipastikan, bahwa Indonesia takkan melepaskan sejeنگkal tanahpun dari Irian Jaya untuk mengadakan perubahan perbatasan (border corrections), sekalipun hal ini dilakukan dengan tekanan dari luar. Maka Pemerintah Indonesia takkan mengakui adanya OPM.

Sir Maori Kiki — sewaktu masih menjabat Menteri Luar Negeri Papua New Guinea — pernah menyarankan serta berikhtiar "hendak mempertemukan para pembesar Indonesia dengan pimpinan OPM di suatu lokasi di Papua New Guinea". Kedutaan Besar RI di Port Moresby telah menerima perintah dari Jakarta "untuk mengabaikannya saja dan jangan sekali-kali bertemu dengan kaum pemberontak".

Tertimpa oleh konfrontasi fisik yang berkobar antara Belanda dan Indonesia dalam perebutan Irian Barat, maka banyak penduduk meninggalkan kampung halamannya, berjalan kaki ke arah timur, dan memasuki "The Territory of Papua and New Guinea" yang waktu itu masih di bawah administrasi Australia. Bagi Pemerintah Australia tak ada pilihan lain kecuali memberikan "permissive residence" (memperbolehkan tinggal) kepada pelarian-pelarian ini, namun dengan syarat bahwa "tidak boleh melibatkan diri dalam segala kegiatan politik" (refrain themselves from all political activities).

Di antara kaum pelarian terdapatlah orang-orang yang telah menerima pendidikan dari Belanda sehabis Perang Dunia II sewaktu Belanda menduduki Irian Barat kembali. Jauh berbeda dengan sikapnya acuh tak acuh terhadap koloninya sebelum perang, tiba-tiba dan tampaknya terburu-buru mulailah Belanda dengan usaha pembangunan Irian Barat "yang katanya akan diberi kemerdekaan pada tahun 1970". Sekolah-sekolah dibuka di Hollandia (Jayapura sekarang) dan putera daerah diperbolehkan masuk. Putera-putera daerah secara kilat dilatih dan ditempatkan dalam kedudukan-kedudukan yang dahulunya belum pernah diberikan kepada mereka. Begitu pula Dewan Papua (Papua Raad) untuk "mewakili" rakyat Irian Barat, dan suatu Papua Brigade mereka hidupkan. Maka pada banyak di antara putera daerah ini — yang telah mendapat pengaruh pendidikan Belanda dan melihat prospek kemudian harinya menjadi suram dengan adanya pergantian kekuasaan ke tangan Indonesia — timbul rasa kurang puas dengan Keputusan Komisi Pengawas PBB (United Nations Supervisory Committee) yang "telah menyerahkan Irian Barat kepada pihak Indonesia". Maka banyak di antara mereka pula yang memutuskan untuk lari ke Papua New Guinea.

Pada umumnya dapatlah dilihat bahwa mayoritas kaum pelarian datang dari daerah-daerah yang merupakan pusat pemerintahan Belanda sehabis perang di mana proses pergantian sosial sedang berlaku dengan hebatnya (accelerated social transition). Dari nama-nama "fam" (suku atau clan) para pelarian — yang sekarang bermukim di Papua New Guinea dan diperkirakan ada 5.000 orang jumlahnya — dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa yang paling banyak berasal dari daerah Jayapura dan sekitarnya, antara lain Sentani, Tobati, Sobron Dosai, Genyem; banyak pula dari Biak yang mudah dikenal dari awalan "Rum" (= rumah) pada "fam"-nya, kemudian cukup banyak

dari daerah Merauke — yang berbatasan dengan Papua New Guinea, dan ada pula yang berasal dari Paniai, Sorong dan Serui.

Pada mulanya Pemerintah Australia mengambil keputusan untuk menempatkan mereka di Pulau Manus yang letaknya agak jauh terpencil di sebelah utara Papua New Guinea. Di antara mereka terdapat bekas pegawai negeri pemerintahan Belanda di Irian Barat, bekas serdadu, guru, pelajar, banyak buruh dan orang-orang desa pula. Dalam keadaan Papua New Guinea masih sangat kekurangan tenaga dalam segala bidang, golongan pelarian ini merupakan suatu sumber tenaga yang berharga (valuable asset), maka kemudian mereka dipindahkan dari Manus untuk disebarakan ke kota-kota di daratan Papua New Guinea, dan ditempatkan di mana mereka dapat dipakai. Di ibu kota Port Moresby saja terdapat paling sedikit 500 orang pelarian yang masing-masing telah mendapat kedudukan atau pekerjaan yang tertentu. Yang kurang beruntung ialah mereka yang tak mempunyai ketrampilan (skill) apa-apa, lalu mereka harus menerima pekerjaan buruh kasar apa saja; inipun kalau ada.

Di Papua New Guinea, di mana banyak tradisi masih kuat berakar, terutama hak milik atas tanah sedemikian pentingnya sehingga "kehormatan dalam masyarakat" (social prestige) ditentukan pula oleh ada tidaknya seseorang mempunyai tanah. Hak atas tanah desa — yang tak boleh diganggu gugat — dimiliki oleh masing-masing suku. Perang suku di Papua New Guinea bisa dicetuskan oleh pelanggaran hak milik tanah ini. Maka sesungguhnya pelarian — di mata orang Papua New Guinea — tak mempunyai "social prestige", justru karena dia tak memiliki tanah sejangkalpun. Sekalipun seorang pelarian berhasil kawin dengan seorang puteri Papua New Guinea, ini tak berarti, bahwa ia dengan otomatis akan mendapat bagian dari tanah pusaka desa isterinya. Tanah pusaka di desa tetap dimiliki oleh clan isterinya, dan anak-anaknya harus balik ke kampung isterinya bila mereka hendak mengerjakan tanahnya.

Walaupun rupa fisik orang Irian mirip dengan penduduk asli Papua New Guinea — mereka toh tetap dianggap orang asing oleh penduduk setempat. Sebagaimana tampaknya nasib seorang refugee di seluruh dunia ini, mereka umumnya dicurigai penduduk setempat pula. Adanya mereka di rantau orang selalu dihubung-hubungkan pula dengan pendapat umum bahwa "kaum refugee mengambil sebagian

dari makanan yang sebenarnya disediakan untuk rakyat setempat". Begitu pula adat-istiadat lokal, apalagi di Papua New Guinea di mana ada kira-kira 750 macam bahasa masih dipakai sehari-hari — dalam banyak hal berlainan dengan adat kebiasaan di Irian Jaya. Oleh sebab inilah maka rata-rata pelarian tak suka tinggal di daerah pedesaan, maka tampaklah di kota-kota seperti Port Moresby, Wewak, Lae dan Madang mereka bertempat tinggal mengelompok.

Hasrat untuk mengatasi kehidupan (survival) mereka di Papua New Guinea besar tampaknya. Kebanyakan telah mendapat tempat dan pekerjaan, sementara orang berhasil menempati kedudukan yang cukup vital dalam masyarakat Papua New Guinea. Sepanjang pengetahuan saya dua orang menjabat kepala rumah sakit, di Port Moresby dan di Rabaul, seorang menjadi Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Papua New Guinea di Port Moresby, seorang lagi mendapat kedudukan sebagai kepala bagian Penyiaran Radio (National Broadcasting Corporation) Pusat di Port Moresby, ada yang menjadi wartawan Post-Courier, harian nasional dalam bahasa Inggris yang terpenting, dan banyak menjadi pegawai pemerintah, guru, dan ada pula yang menceburkan diri dalam bisnis kecil-kecilan. Mayoritas yang tak mempunyai ijazah ataupun keahlian menjadi buruh biasa dalam segala bidang. Dalam pergaulan mereka dengan masyarakat setempat, tak dapatlah dihindarkan, bahwa suara mereka — terutama yang ada hubungannya dengan pengalaman-pengalaman mereka yang kurang beruntung di Irian Barat dahulu — mempengaruhi pendapat umum di Papua New Guinea, terutama terhadap politik dan kebijaksanaan Pemerintah Indonesia yang sedang berlaku di Irian Jaya.

Di kalangan kaum refugee di Papua New Guinea tak terdapat pimpinan. Serupa halnya dengan OPM di dalam mana pengelompokan-pengelompokan politik (factions) saling bersaing dengan sengitnya, misalnya Jacob Prai memutuskan hubungan dan mengakui dirinya telah merebut pimpinan dari Rumkorem, dan Si Kawakan Nicholaas Youwe yang sejak Belanda mengangkat kaki dari Irian Barat menetap di Holland, masih tetap menamakan dirinya "pemimpin Pemerintah West Papua dalam suaka (in exile)". Sama halnya dengan pelarian-pelarian yang beberapa ribu itu dan menikmati "permissive residence" di Papua New Guinea belum bersetuju tentang "siapa pemimpin mereka" itu. Karena pertama-tama mereka tak diperkenankan berpolitik, tambahan pula amat sukar rupanya mempersatukan

mereka, oleh karena latar belakang sosial serta kepentingan mereka masing-masing berbeda-bedalah!

Banyak refugee di Papua New Guinea mengutarakan hasrat keinginannya hendak menengok kampung asalnya, karena mereka sangat rindu terutama kepada kaum kerabatnya yang dahulu sekonyong-konyong mereka tinggalkan. Namun demikian kembalipun mereka tak berani. Maka dengan macam-macam media mereka memelihara hubungan dengan Irian Jaya, dan kadang-kadang mengherankan betapa banyaknya dan tepatnya mereka mengetahui tentang perkembangan, masalah-masalah serta kejadian-kejadian yang terakhir di Irian Jaya. Mereka masih suka mendambakan kesukuan serta identitas mereka ialah apa yang mereka namakan dirinya "West Papua", dan suka mengagungkan dirinya bahwa "mereka lebih tahu dan lebih rajin bekerjanya daripada orang Papua New Guinea" dan sebagainya. Sewaktu ada pertandingan sepak bola Papua New Guinea melawan Irian Jaya di Hubert Murray Stadium di Port Moresby pada tahun 1976, merekalah yang paling ramai berteriak-teriak dan bersorak-sorai mendukung kesebelasan Irian, yang akhirnya menang juga.

Sebaliknya idam-idaman kebanyakan di antara mereka ialah menjadi warga negara Papua New Guinea, karena sebagai "refugee" mereka tak mempunyai "status", lagi pula untuk menyelamatkan kemudian harinya (future security). Sejak Desember 1976, 157 pelarian telah memperoleh "Papua New Guinea citizenship", tetapi bagi banyak pula hal ini masih dipertimbangkan. Begitu menjadi warga negara Papua New Guinea, mereka suka menonjol-nonjolkannya, misalnya kepada saya sering mereka tak lupa mengatakan dalam bahasa Inggris: "I am a Papua New Guinea citizen, you know!" Saya tahu pula, bahwa di rumah dan di kalangan mereka sendiri, mereka tetap berbicara bahasa Indonesia dengan logat Irian (Ambon).

Papua New Guinea yang menjadi merdeka pada tanggal 16 September 1975 telah mewarisi persoalan-persoalan yang bergandengan dengan pelarian dari Irian Jaya dan OPM. Yang berjasa merumuskan politik luar negeri terhadap tetangganya, yakni Indonesia — yang sensitif terhadap dua isu ini — ialah Perdana Menteri Michael Somare yang dengan mengabaikan kecaman-kecaman dan teriakan-teriakan ancaman dari pihak simpatisan-simpatisan "West Papua" berhasil mengadakan "package deal" dengan Indonesia dengan politik "universalisme"-nya, yang "enables Papua New Guinea to enter into

friendly relations with all countries irrespective of their size and political system". Pada kunjungannya ke Jakarta pada bulan Januari 1977 diwartakan "he (= Michael Somare) did not want to play down the importance of the border issue", dan "it should not overshadow other aspects of bilateral relations of great significance". Pada bulan Oktober 1977, Patterson Lowa, bekas Menteri Kepolisian dan Acting Menlu dan Perdagangan, dalam menjawab anggota DPR Wewak, Tony Bais, berkata bahwa "the Papua New Guinea government had clearly stated that Irian Jaya is an integral part of Indonesia. It has accepted the realities of the situation, and was dealing in a responsible manner with problems which involved border crossers, dissident Irianese groups, and permissive residents. The United Nations and the international community had accepted Indonesia's sovereignty over Irian Jaya, despite the cultural and ethnic links between Papua New Guinea and Irian Jaya, and that it would not be in the best interest of Papua New Guinea to reopen the question of a separate state or independence in the United Nations".

Papua New Guinea posisinya menjadi kikuk (awkward). Karena pada satu pihak "Papua New Guinea menghormati kedaulatan mutlak atas Irian Jaya", akan tetapi di lain pihak "memperbolehkan gembong-gembong OPM ke luar masuk Papua New Guinea untuk bermusyawarah dengan pejabat-pejabatnya yang tertinggi". Usaha bekas Menlu Mairo Kiki pada tahun 1976 yang kemudian diulangi oleh Perdana Menteri Somare dalam bulan Nopember 1977 untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai, ialah mengajak pihak Indonesia dan OPM pada meja musyawarah gagallah — sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, karena Pemerintah Indonesia tidak memperkenankan pejabatnya bertemu dengan kaum separatis di luar negeri. Pemerintah Papua New Guinea menawarkan jasa-jasanya sebagai perantara (mediator).

Sejak kemerdekaan Papua New Guinea pertemuan antara bupati-bupati masing-masing dari Jayapura dan Merauke dengan rekan-rekannya dari West Sepik dan Western Province, sebulan sekali dilangsungkan bergiliran di Jayapura atau Wewak, dan Merauke atau Daru, terutama untuk membicarakan soal-soal mengenai perbatasan bersama.

Selama tahun 1977 sikap Pemerintah Papua New Guinea terhadap OPM dan pelarian sangat berubah. Dalam bulan Januari 1977 setelah

terjadi kericuhan-kericuhan di Irian Jaya mengenai pemilu pada tanggal 2 Mei 1977, ada 346 orang putera daerah Irian berusaha masuk Propinsi West Sepik dan Western Province, tetapi dihentikan oleh patroli perbatasan Papua New Guinea. Perdana Menteri Somare mendesak agar supaya mereka balik ke kampungnya saja, karena "his government did not wish to get involved in Indonesia's internal affairs, but would seek assurances from the Indonesian government that the welfare of the refugees would be safeguarded". Dalam bulan Nopember 1977 10 orang pelintas perbatasan (border crossers) — ruparupanya pengikut Rumkorem — di bui (penjara) untuk lima bulan, karena masuk Papua New Guinea secara tidak legal. Menteri Luar Negeri Papua New Guinea, yang pada waktu itu Ebia Olewale, memberikan komentar bahwa "the men would be allowed permissive residency in Papua New Guinea, if there was proof that their lives would be endangered if they were sent back to Irian Jaya". Maka dengan mengatakan saja bahwa seorang pelarian termasuk pengikut Rumkorem, tak lagi bisa dipakai sebagai paspor memasuki Papua New Guinea. Hal yang serupa terjadi pada bulan Januari 1978 ketika Pengadilan Negeri Vanimo di Propinsi West Sepik menghukum 6 bulan penjara 5 pemuda Irian belasan tahun yang masuk Papua New Guinea secara tidak legal. Dalam bulan itu juga Pemerintah Papua New Guinea mengumumkan, bahwa akan diadakan prosedur-prosedur anti-teroris pada lima lapangan udara ialah di Port Moresby, Wewak, Kieta, Daru dan Vanimo karena "it was concerned about possible transportation of arms from Papua New Guinea to the Irian Jaya border", dan lagi "it is worried about terrorist threats made by the leader of the new provisional government of West Papua (Irian Jaya), Jacob Prai". Baru dalam tahun 1979 Jacob Prai bersama "ajudannya" Otto Ondowame terjebak oleh intel Papua New Guinea di suatu tempat di West Sepik, dan kemudian dimasukkan penjara di Port Moresby untuk menunggu ekstradisi (pengusiran) dari Papua New Guinea. Lalu diiklankan negara-negara mana yang bersedia memberikan suaka tetap kepada mereka ini. Anehnya, tak ada satu negarapun yang sanggup, kecuali Swedia. Bersama dengan mereka ada juga seorang putera bupati Jayapura, yang sudah lama meninggalkan Irian Jaya untuk kemudian menjadi satu-satunya pilot pesawat tempur di Papua New Guinea. Dia terlibat dalam perkara Prai Ondowame, dan dideportasikan ke Swedia juga. Baru-baru ini ada lagi kejadian seorang putera daerah Irian yang pernah menjabat Wakil Gubernur Irian Jaya, ialah E. Bonay, yang menghilang dari daerah Jayapura untuk kemudian muncul di Port Moresby dan minta suaka.

Pelintasan perbatasan selalu merupakan "one way route" dari Irian ke Papua New Guinea, dan belum pernah kebalikannya terjadi. Kategori-kategori baru yang lain pula — yang menamakan dirinya "refugee" — muncul di perbatasan Papua New Guinea: pemuda-pemuda putera daerah yang berpetualang "hendak berpesiar ke luar negeri" yang kemudian dikembalikan naik pesawat terbang, dan orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan kriminal di Irian Jaya dan hendak meloloskan diri dari peradilan dan hukuman. Dari pusat-pusat penampungan pelarian di daerah perbatasan Papua New Guinea dikabarkan bahwa "di antara refugees tidak hanya terdapat putera daerah Irian saja, tetapi ada pula yang berasal dari lain-lain daerah Indonesia, yang mengakui dirinya OPM".

Ada pula timbul pemikiran di Papua New Guinea untuk melakukan patroli perbatasan bersama (jointly patrolling the common boundary) jadi Pacific Islands Regiment Papua New Guinea campur ABRI, yang amat boleh jadi merupakan satu cara yang paling efektif dalam menyelesaikan pelintasan perbatasan, tetapi pelaksanaan ide ini kemudian dibatalkan karena dikuatirkan akan menimbulkan sentimen-sentimen di kalangan umum di Papua New Guinea.

Perubahan sikap Pemerintah Papua New Guinea yang lebih keras terhadap OPM dan kawan-kawannya ini rupanya menimbulkan amarah di kalangan simpatisan-simpatisan OPM di Papua New Guinea. Dalam tahun 1978 Kantor Besar Pusat Pemerintah Papua New Guinea di Waigani, Port Moresby, dibakar habis bagian atasnya, ialah bagian Keuangan, dan didesas-desuskan bahwa "antek-antek OPM yang bertanggung jawab akan perbuatan itu". Hingga kini kantor yang hangus itu belum diapa-apakan. Di harian "Post Courier" pernah ditulis ancaman dari pihak OPM bahwa "jikalau Pemerintah Papua New Guinea tidak mau memberikan bantuan kepada OPM (di situ disebut "for the West Papue cause") bantuan dari negara-negara komunis akan diminta pula". Pemerintah Papua New Guinea tak gentar akan intimidasi gertak sambal itu, malahan tambah mengeras dalam sikap dan waspadanya. Akhirnya juga tidak terjadi apa-apa.

Yang paling akhir dalam tahun 1979 kejadian yang mengejutkan ialah serangan OPM terhadap pusat penampungan pelarian (refugee centre) di daerah perbatasan Papua New Guinea dengan membawa lari makanan dan barang-barang. Ada yang meninggal pula dalam serangan mendadak itu. Kamp-nya dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan penjagaan diperketat. Ada dugaan bahwa OPM sudah kehabisan bekal, ataupun OPM hendak membuktikan bahwa mereka

masih ada, dan aktif pula. Konon kabarnya, Rumkorem masih berkeliaran di daerah perbatasan.

Tahun-tahun 1978-1979 merupakan tahun yang mehunjukkan pula kelunakan dari pihak Pemerintah Indonesia hendak memberikan kesempatan kepada bekas pelarian dari Irian Jaya — yang telah menjadi warga negara Papua New Guinea untuk mengunjungi familinya di Irian Jaya. Dengan ditilik betul siapa-siapa pantas diberi visa, maka telah banyak eks refugee berkunjung ke kampung halamannya dahulu. Begitu pula atas kebijaksanaan Duta Besar di Port Moresby, Mayjen Drs. Busiri Suryowinoto telah diusahakan kesebelasan sepak bola University of Papua New Guinea — justru mahasiswa-mahasiswa yang paling suka mengkritik soal "West Papua" — untuk pergi ke Jayapura selama dua minggu dan main dengan kesebelasan Irian Jaya dan Universitas Cenderawasih. Selama itu mereka menjadi tamu kehormatan Bapak Gubernur Sutran.

Saya rasa kebijaksanaan ini boleh dipuji, karena terbukti merupakan senjata halus untuk meyakinkan mereka, bahwa keadaan di Irian Jaya sekarang sudah sangat berlainan daripada tahun-tahun 1963-1969. Tampak pada para pengunjung, bahwa sikap dan pendapat mereka mengenai Irian Jaya berbalik 180 derajat. Malahan ada yang menjadi marah, karena "kabar-kabar yang disiarkan di Papua New Guinea mengenai Irian Jaya adalah bohong katanya". Di antara pemain sepak bola Papua New Guinea, sudah ada beberapa orang yang mengajukan permintaan mau kawin dengan puteri Indonesia. Sebetulnya, pemimpinnya, Paul Masta dari Fakultas Hukum Universitas Papua New Guinea pada bulan Nopember tahun yang lalu, telah jadi kawin dengan puteri daerah Irian Jaya.

Di daerah Irian Jaya selalu dikabar-kabarkan bahwa situasi ekonomi di Papua New Guinea jauh lebih bagus. Pegunungan yang dari jauh tampak kebiru-biruan di sebelah timur dan yang merupakan perbatasan alam antara Irian Jaya dan Papua New Guinea, dengan Teluk Yos Sudarso sayu berkilau-kilauan di bawah bukit-bukit sekitarnya, agaknya selalu mengelu-elukan putera daerah untuk pergi ke "tanah makmur di mana pekerjaan terdapat dengan berlimpah-limpah". Bagi para putera daerah — apalagi yang tergolong lapisan rendahan — keadaan ekonomi di daerahnya sendiri tak kelihatan cerah.

Walaupun Repelita sekarang sudah sampai pada tahap ketiganya, dan sekolah-sekolah umum dan berbagai sekolah ketrampilan (vocational schools) telah memberikan rakyat Irian Jaya lebih banyak kepandaian, bagi putera daerah sendiri menjadi semakin sulit untuk bersaing dengan para pendatang dalam hal mencari pekerjaan di pasaran tenaga kerja bebas di Irian Jaya.

Karena sayup-sayup terdengar kabar bahwa nun jauh di sebelah sana perbatasan, gaji pekerja adalah 3 sampai 5 kali lebih besar, maka banyak putera daerah berusaha melintasi perbatasan untuk beradu keuntungan nasib mereka, tanpa mengetahui bahwa lowongan pekerjaan di Papua New Guinea serba terbatas, lagi pula kebanyakan pekerjaan adalah disediakan untuk warga negara Papua New Guinea sendiri.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa majalah dan buku-buku:

ANALISA

terbitan berkala, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Termasuk dalam seri ini adalah MONOGRAF yang membahas satu analisa tertentu. Harga per eks Rp. 500,— langganan setahun (12 nomor) Rp. 6.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 4.800,—

THE INDONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulan, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp. 800,—, langganan setahun (4 nomor) Rp. 3.200,—

BUKU—BUKU

hasil penulisan staf CSIS baik mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:

BIRO PUBLIKASI — CSIS

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat Telepon 349489

Untuk menunjang kegiatan pengkajian CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN CSIS dan BIRO INFORMASI DAN DATA CSIS

Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Telepon 356532-5

